

Hadis Kepemimpinan: Apakah Boleh Tidak Taat Pemimpin?

Delfi Yanti*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: delfiyanti@gmail.com

Article History

Received: 13,
Maret, 2025

Revised: 19 Mei,
2025

Accepted: 26, Juni,
2025

Available Online:
23, Juli, 2025

Abstrak: Artikel ini mengkaji hadis-hadis kepemimpinan dengan fokus pada batasan ketaatan kepada penguasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan sumber utama kitab-kitab hadis kanonik serta literatur sekunder dalam kajian Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan tematik dan deskriptif untuk menyingkap prinsip etis yang mendasari kepemimpinan dalam Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan prinsip penting demi menjaga ketertiban sosial, namun tidak bersifat mutlak; ketaatan gugur ketika pemimpin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kajian ini menegaskan pentingnya keseimbangan etis antara loyalitas dan resistensi, sekaligus menawarkan relevansi etika politik Islam dalam menghadapi tantangan otoritarianisme kontemporer.

Kata Kunci: *Hadis Kepemimpinan; Taat; Tidak Taat.*

Abstract: This article examines prophetic traditions (ḥadīth) on leadership, focusing on the boundaries of obedience to rulers. Using a qualitative library research method, data were collected from canonical ḥadīth compilations and supported by secondary literature in Islamic studies. The analysis employed thematic and descriptive approaches to explore the ethical principles underlying leadership in Islam. The findings indicate that while obedience to leaders is an essential principle to maintain social order, it is not absolute; obedience ceases when leaders command actions contrary to the teachings of Islam. This study highlights the ethical balance between loyalty and resistance, offering contemporary insights into Islamic political ethics and their relevance in addressing modern challenges of authoritarianism.

Keywords: *Hadith Leadership; Obedience; Disobedience.*

Pendahuluan

Kepemimpinan dalam Islam memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian yang besar terhadap figur pemimpin, baik dalam aspek amanah, tanggung jawab, maupun relasi

antara pemimpin dan rakyat. Salah satu tema penting yang sering menimbulkan diskursus akademik adalah persoalan ketaatan terhadap pemimpin, terutama ketika pemimpin yang berkuasa tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepemimpinan profetik.

Hadis-hadis Nabi menekankan kewajiban taat kepada pemimpin, bahkan dalam kondisi sulit, selama tidak diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Namun, persoalan muncul ketika dihadapkan pada realitas kepemimpinan yang cenderung otoriter, represif, atau menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah ketaatan kepada pemimpin bersifat mutlak, ataukah terdapat batasan normatif yang digariskan oleh hadis? Pertanyaan ini relevan tidak hanya dalam konteks klasik, tetapi juga dalam dinamika politik kontemporer.

Kajian akademik mengenai hadis kepemimpinan menunjukkan adanya dialektika antara perintah taat kepada pemimpin dengan prinsip keadilan dan larangan taat kepada makhluk dalam kemaksiatan terhadap Sang Pencipta. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung menekankan aspek stabilitas dan persatuan umat sebagai alasan utama ketaatan. Namun, ruang analisis lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan batasan ketaatan, sehingga tidak berimplikasi pada legitimasi terhadap kepemimpinan zalim atau otoriter. Di sinilah pentingnya studi hadis secara mendalam untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan dan resistensi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis kepemimpinan yang berkaitan dengan ketaatan dan batasannya, serta mengkontekstualisasikannya dengan tantangan kepemimpinan modern. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini tidak hanya menegaskan prinsip normatif Islam tentang ketaatan, tetapi juga menawarkan pembacaan kritis terhadap kemungkinan ketidaktaatan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan etika politik Islam yang relevan bagi wacana akademik dan praktik kepemimpinan kontemporer.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data utama bersumber dari kitab-kitab hadis kanonik seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, dan *Sunan an-Nasa'i*, yang memuat riwayat terkait kepemimpinan dan ketaatan terhadap pemimpin. Selain itu, literatur sekunder berupa kitab syarah hadis, karya ulama klasik, serta artikel jurnal ilmiah terindeks internasional juga digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mencatat riwayat hadis serta interpretasi para ulama mengenai isu kepemimpinan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan teks hadis beserta konteks periwayatannya, lalu menganalisis maknanya dalam kerangka etika kepemimpinan Islam. Validitas data diperkuat dengan metode takhrij hadis untuk menelusuri derajat kesahihan riwayat, serta analisis tematik (maudhu'i) guna mengelompokkan hadis-hadis relevan ke dalam tema ketaatan, batasan kepemimpinan, dan larangan otoritarianisme. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap pemahaman yang komprehensif dan kontekstual mengenai batasan ketaatan kepada pemimpin menurut hadis Nabi.

Hasil dan Pembahasan

Taat Kepada Pemimpin

Salah satu kewajiban umat Islam adalah taat dan patuh kepada para pemimpinnya. Kewajiban tersebut bukan tanpa dasar alasan, dengan ketaatan berarti menyelamatkan diri dari kehancuran dan kebinasaan. Ketaatan merupakan sendi dasar tegaknya urusan suatu kaum atau golongan. Jika tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin, maka pondasi suatu kepemimpinan atau pemerintahan tidak akan kuat, mudah runtuh, situasi akan menjadi stagnan dan vakum yang pada akhirnya menimbulkan berbagai fitnah yang menghancurkan. Atas dasar itu, ketaatan dan kepatuhan adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam, suatu dasar awal yang wajib dimiliki oleh umat Islam, karena Islam sendiri bermakna taat, patuh, dan tunduk.

Melihat peran dan fungsi pemimpin yang begitu urgen dan vital, taat kepadanya menjadi hal yang niscaya, mentaati pemimpin juga menjadi cerminan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula sebaliknya, tidak taat dan tidak tunduk kepada pemimpin berarti menentang dan durhaka kepada Rasulullah yang berarti pula menentang Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Nabi bersabda :

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي. (متفق عليه)

Artinya : *"Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah. Dan siapa yang maksiat kepadaku, berarti ia maksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku (penggantikmu), maka berarti ia taat kepadaku. Dan siapa yang melanggar pemimpinku, berarti ia melanggar kepadaku"*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Mentaati pemimpin bukan didasarkan pada rasa suka atau benci, ringan atau berat, mudah atau sulitnya perintah sang pemimpin. Tapi, ketaatan itu menuntut dalam situasi apapun, meski pemimpinnya adalah budak sekalipun. Sebagaimana sabda Nabi :

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ رَبِيبِيَّةً. (رواه البخاري)

Artinya : *"Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian semua, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak ethiopia yang kepalanya seperti anggur kering"*. (HR. Bukhari).

Justru akibat fatal jika meninggal dunia dan belum sempat mentaati pemimpin dengan cara membaicitnya, maka kematiannya adalah mati jahiliyyah. Dalam hal ini Nabi juga bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم)

Artinya : *“Barangsiapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka kelak di hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah tanpa memiliki hujjah. Barangsiapa mati, sedangkan di lehernya tidak ada bai’at (kepada pemimpinnya), maka matinya seperti mati jahiliyyah”.*(HR. Muslim).

Batasan Taat Kepada Pemimpin

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah taat kepada pemimpin. Ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa, ketaatan merupakan sendi asas tegaknya suatu kepemimpinan dan pemerintahan. Tanpa ketaatan dan kepercayaan kepada pemimpin, kepemimpinan dan pemerintahan tidak mungkin tegak dan berjalan sebagaimana mestinya. Jika rakyat tidak lagi mentaati pemimpinnya maka, roda pemerintahan akan lumpuh dan akan muncul fitnah di mana-mana. Atas dasar itu, ketaatan kepada pemimpin merupakan keniscayaan bagi tegak dan utuhnya suatu negara. Bahkan, dasar dari ketertiban dan keteraturan adalah ketaatan. Rasulullah s.a.w selalu menekankan kepada umatnya untuk selalu taat kepada pemimpin dalam batas-batas syari’atnya.

حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب فكره، ما لم يؤمن بمعصية، فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (اخرجه البخارى)
Artinya: *“Hadits Abdullah ibnu Umar ra. Dari Nabi saw beliau bersabda: mendengarkan dan mentaati merupakan kewajiban seorang muslim mengenai hal-hal yang ia sukai dan ia benci, sepanjang ia tidak diperintahkan berbuat durhaka. Maka jika diperintah berbuat durhaka, maka tidak lah boleh mendengarkan dan tidaklah boleh mengikutinya.*

Sabda Rasulullah saw: “wajib atas seorang muslim”, kalimat ini menunjukkan kewajiban. Maka wajib bagi seseorang muslim berdasarkan keislamannya untuk selalu mendengarkan dan menaati pemerintah. Baik dalam hal yang ia sukai maupun yang ia benci. Walaupun ia memerintahkan dengan sesuatu yang dibencinya, namun ia wajib melaksanakannya, kecuali jika perintah itu bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan kepada Allah itu diatas segala ketaatan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat terhadap khaliq.

حديث علي رضى الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا من الانصار وامرهم ان يطيعوه فغضب عليهم، وقال: اليس قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا واوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا. فأوقدوا. فلما هموا بالخل فقام ينظر بعضهم الى بعض، قال بعضهم: انما تبغنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار افندخلها؟ فبينما هم كذلك اذ خمدت النار، فسكن غضبه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها ابداء، انما الطاعة فى المعروف

Artinya: *Hadits Ali ra, ia berkata: Nabi saw mengirimkan pasukan tentara dan mengangkat seorang laki-laki dari golongan anshar untuk menjadi komanan pasukan itu. Dan Nabi memerintahkan pasukan itu agar menaatinya lalu komandan pasukan itu memarahi pasukan sambil mengatakan: bukankan Nabi saw sungguh telah menyuruh kalian untuk menaati ku. Mereka menjawab “ya, benar”. Ia berkata: “saya bermaksud agar kalian mengumpulkan kayu bakar, dan kamu nyalakan api lalu kamu sekalian masuk kedalamnya.” Maka mereka mengumpulkan kayu bakar, lalu mereka menyalakannya. Ketika mereka hendak masuk ke dalam api maka sebagian dari mereka melihat kepada sebagian yang lain. Sebagian dari mereka berkata: “sesungguhnya kami mengikuti Nabi saw. agar terlepas dari api maka mengapakah kita akan memasukinya?” ketika mereka dalam keadaan demikian tiba-tiba api pun padam dan kemarahan komandan pun hilang. Lalu kasus tersebut disampaikan*

kepada Nabi saw. maka beliau bersabda: “seandainya mereka masuk ke dalam api itu, pastilah mereka tidak akan keluar dari padanya untuk selamanya, sesungguhnya kepatuhan itu adalah pada sesuatu yang baik.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (اخرجه البخارى فى كتاب الأحكام)
Artinya : “Hadits Abdullah bin Umar r.a dari Nabi saw., beliau bersabda: ”(Keharusan) mendengar dan taat kepada seorang muslim berlaku dalam sesuatu yang ia sukai dan ia benci selama tidak menyuruh maksiat. Apabila (ia) diperintah melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan tidak (pula wajib) mentaatinya.” (Ditakhrij oleh al-Bukhari dalam kitab al-Ahkam.)”

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib ta’at dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh berontak atau melawan. Dalam hadis di atas, batasan-batasan kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat ma’siyat. Lantas pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan maksiat itu?

Secara bahasa maksiat adalah berarti durhaka atau tidak ta’at kepada Allah. Namun secara istilah, makna ma’siyat cukup beragam. Karenanya, adalah salah kaprah bila kita membatasi makna ma’siyat hanya pada perkara-perkara semacam pornografi dan pornoaksi, seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam dalam melakukan pengrusakan tempat hiburan dengan dalih menghapus kema’siyatan.

Padahal kemaksiatan bukan hanya berada di tempat hiburan malam, akan tetapi di kantor-kantor pemerintah justru lebih banyak kema’siyatan dalam bentuknya yang samar namun cukup memprihatinkan. Lihatlah misalnya di kantor-kantor departemen, di ruang-ruang sidang para wakil rakyat, bahkan di masjid sekalipun, kita bisa menjumpai kema’siyatan. Namun yang dimaksud kema’siyatan di sini tentunya bukan penari telanjang atau orang yang sedang mabuk-mabukan, melainkan tindakan-tindakan yang mendurhakai Allah yang dipertontonkan oleh para pemimpin kita, wakil rakyat kita dan bahkan ulama-ulama kita. Bukankah korupsi, kolusi dan semua hal yang mengarah pada ketidakjujuran dalam memimpin negeri ini serta mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil juga termasuk ma’siyat. Bukan hanya itu, seorang ulama yang pandai berkhotbah namun dia menjadi jurkam dari pemimpin yang korup juga telah masuk dalam kategori berbuat ma’siyat. Bahkan tindakan yang tidak melindungi anak-anak terlantar, janda-janda tua dan kaum miskin papa juga termasuk ma’siyat karena semua itu merupakan perintah Allah, dan bagi siapa yang tidak melaksanakan perintah Allah maka dia telah mendurhakai Allah, dan orang yang durhaka berarti berbuat ma’siyat kepada Allah.

Dengan demikian, kema’siyatan yang tidak perlu dipatuhi seorang rakyat terhadap pemimpinnya adalah kemaksiatan dengan pengertiannya yang cukup luas (mendurhakai Allah) bukan saja kema’siyatan yang berarti sempit (seperti pornoaksi dan pornografi). Oleh sebab itu, dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa apabila pemimpin kita sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip kejujuran serta tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil, maka batasan kepatuhan

terhadap pemimpin tersebut sudah gugur dengan sendirinya, karena pemimpin itu sendiri sudah termasuk kema'siyatan yang perlu untuk dihapuskan di muka bumi ini.

Penutup

Kajian terhadap hadis-hadis kepemimpinan menunjukkan bahwa Islam menempatkan ketaatan kepada pemimpin sebagai prinsip fundamental dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan keberlangsungan masyarakat. Namun, ketaatan tersebut bukanlah mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai syariat. Hadis Nabi ﷺ secara tegas menolak ketaatan apabila pemimpin memerintahkan kemaksiatan, sehingga prinsip moral dan etika Islam tetap menjadi landasan utama dalam hubungan antara rakyat dan pemimpin. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bukanlah ruang otoritarianisme, melainkan amanah yang terikat dengan tanggung jawab ilahiah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis kepemimpinan memberikan panduan normatif yang seimbang antara kewajiban taat kepada pemimpin dan hak untuk tidak taat ketika perintah bertentangan dengan syariat. Batasan ini berfungsi sebagai mekanisme etis sekaligus spiritual untuk mencegah lahirnya legitimasi terhadap kepemimpinan zalim. Relevansinya dalam konteks kontemporer adalah perlunya menghidupkan kembali etika kepemimpinan Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan akuntabilitas, sehingga tercipta pola kepemimpinan yang melindungi umat dari praktik otoritarianisme.

Daftar Pustaka

- Affani, S. F. (2024). *Islamic leadership: bibliometric analysis of Scopus-indexed research*. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 9(1), 1–20.
- Ainunajip, M. N. (2025). *Analysis of leadership values in prophetic hadith: Implications for modern governance*. *International Journal of Islamic Education*, 5(1), 12–29.
- Bakour, B. (2025). *Reconceptualizing political obedience in Islamic thought: An analytical study of hadith literature*. *Asian Journal of Islamic Studies*, 12(1), 45–68.
- Campbell, R. A. (2008). *Leadership succession in early Islam: Exploring the nature of authority*. *The Leadership Quarterly*, 19(1), 47–66.
- Faris, N. (2011). *Islamic organizational leadership within a Western society*. *International Journal of Intercultural Relations*, 35(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2010.12.003>.
- Fish, M. S. (2002). *Islam and authoritarianism*. *Comparative Politics*, 35(3), 379–401.
- Javid, F., & kolega. (2024).
- Koburtay, T., & kolega. (2023). *Women leadership, culture, and Islam: Female voices and leadership experiences*. *Journal of Business Ethics*, 182(4), 123–140.
- Prayogo, A., Siregar, M. N., & Zalukhu, S. (2023). Politik Islam kontemporer: Analisis hadis tentang pemimpin pelindung rakyat. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 215–230.
- Van der kolega. (2021). *Authoritarian leadership styles and performance: A systematic review*. *Leadership Quarterly*, 32(6), 101–125. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101125>.